

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Jumat Tanggal: 01 Mei 2009 Halaman: 10

KPU lakukan stikerisasi pemilih

Oleh Yuspita Anjar Palupi HARIAN JOGJA

UMBULHARJO: Sebagai bagian proses pendataan pemilih untuk pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) Juli mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja melaksanakan program stikerisasi. Teknis pelaksanaanan stikerisasi ini, akan dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) usai mereka melakukan pendataan ulang yang dilakukan door to door.

"Ini merupakan rekam jejak dari proses pelaksanaan pemutakhiran data yang dilakukan oleh PPDP secara door to door," terang Anggota KPU Kota Jogja Divisi Logistik, Sunaji kepada wartawan Kamis (30/4).

Dikatakan, untuk kepentingan pertanggungjawaban di lapangan ini, PPDP juga akan meminta tanda tangan dari setiap kepala keluarga (KK) yang didata selain menempelkan stiker kecil bertuliskan "telah di data oleh PPDP".

"Sebagai tanggungjawab administratif, PPDP akan meminta tanda tangan kepada mereka yang telah disurvei," terang Sunaji.

Dikatakan, terkait pelaksanaan stikerisasi ini, KPU menuturkan telah ada kebijakan yang mengatur tentang hal tersebut, yaitu berupa surat dari KPU Pusat. Kemudian karena besar nominal dari pengadaan stikerisasi ini tidak lebih dari Rp5 juta, untuk pembuatan stiker ini, KPU tidak melakukan lelang pengadaan.

"Kami hanya mencetak sekitar 3.000-4.000 stiker. Dengan besar nominal tidak sampai Rp5 juta," kata dia.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Jogja, Nasrullah mengatakan hingga saat ini KPU masih disibukan dengan proses pemutakhiran data. Pada 11 Mei mendatang Daftar Pemilih Sementara (DPS) akan diumumkan. KPU akan memberikan tenggang waktu selama satu minggu kepada warga masyarakat agar benar-benar mencermati DPS yang diumumkan, serta langsung memberikan masukan apabila ada kekeliruan semisal ada warga yang belum terdaftar.

"Lebih dari tenggang waktu yang telah ditentukan, bahkan ketika DPS telah ditetapkan menjadi DPT kami tidak bisa melakukan perubahan. Itu konsekuensi," tegas Nasrullah.

Dikatakan penetapan DPS tersebut dilakukan oleh PPS yang telah melakukan rekuitmen kepada PPDP di setiap wilayah yang didata.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
Sekretariat Komisi Pemilihan U	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005